

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan dari temuan penelitian dan pembahasan mengenai representasi pemindahan ibu kota negara, respon warganet terhadap representasi pemindahan ibu kota negara, dan bentuk relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab IV. Bab ini juga menawarkan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

5.1. Simpulan

Penelitian ini telah dilakukan untuk menjelaskan representasi pemindahan ibu kota negara, dan respon warganet terhadap pemindahan ibu kota negara di media siber diantaranya Kompas, Detik.com, dan CNN Indonesia serta menjelaskan bentuk relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pemindahan ibu kota negara direpresentasikan sebagai sebuah kebijakan, diantaranya sebuah kebijakan berpusat pemerintah, kebijakan yang tak hirau asalah sosial pada saat itu, dan kebijakan yang berpihak atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Berdasarkan representasi pemindahan ibu kota negara pada teks berita menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara direpresentasikan sebagai sebuah kebijakan yang cenderung merugikan masyarakat dan memberikan keuntungan terhadap beberapa atau sekelompok pihak yang menginginkan pemindahan ibu kota negara untuk tetap direalisasikan. Dengan kata lain, pemindahan ibu kota negara merupakan sebuah kebijakan yang ditetapkan bukan berdasarkan kedaulatan rakyat melainkan atas dasar kepentingan dan keinginan pemerintah.

Berdasarkan analisis tindak tutur ilokusi ditemukan bahwa terdapat berbagai komentar dari warganet dalam kolom komentar di media siber. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat jenis tindak tutur ilokusi yang muncul pada kolom komentar yaitu tindak tutur ilokusi asertif, direktif, ekspresif, dan komisif. Tindak tutur

ilokusi asertif terdiri dari menyatakan pendapat (11), menjelaskan (6), dan menginformasikan (2), menyetujui (3). Penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur ilokusi jenis asertif menyatakan pendapat memiliki frekuensi kemunculan lebih sering dibandingkan dengan jenis lainnya. Hal ini menandakan bahwa warganet secara aktif menyatakan pendapatnya terkait pemindahan ibu kota negara melalui kolom komentar.

Tindak tutur ilokusi direktif terdiri dari meminta (1), menyarankan (3), mengizinkan (1) dan memerintah (4). Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak tutur ilokusi jenis direktif menyarankan memiliki jumlah tuturan yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis lainnya. Hal ini menandakan bahwa warganet secara bebas memberikan saran kepada pemerintah terkait isu pemindahan ibu kota negara melalui kolom komentar. Tindak tutur ilokusi ekspresif terdiri dari menyindir (18). Hal ini menandakan bahwa warganet secara aktif dan bebas memberikan sindiran kepada pemerintah terkait kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara. Jenis tindak tutur ilokusi komisif mendoakan (1). Hal ini menandakan bahwa warganet memanjatkan doa terkait isu pemindahan ibu kota negara.

Berdasarkan temuan jenis tindak tutur ilokusi sebagai respon warganet terhadap pemindahan ibu kota negara ditemukan berbagai macam respon, diantaranya menyetujui, menolak, dan ambigu. Warganet menyatakan pendapatnya terkait pemindahan ibu kota negara, baik menyatakan setuju mengenai pemindahan ibu kota negara atau menyatakan penolakannya terhadap pemindahan ibu kota negara. Warganet juga memberikan sindiran bahwa pemindahan ibu kota negara cenderung memberikan kerugian bagi masyarakat dan memberikan sindiran bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan kebijakan yang tidak berdasarkan kedaulatan rakyat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa warganet akan menggunakan kata atau kalimat yang memiliki makna tidak baik ketika menolak representasi pemindahan ibu kota negara.

Berdasarkan analisis semiosis menggunakan teori Peirce yang dijelaskan oleh Hoed (2014) menunjukkan bahwa proses semiosis yang terjadi antara media siber dan warganet hanya terjadi 1 tahap. Proses semiosis terjadi dalam 1 tahap karena media siber tidak memberikan tanggapan lain terhadap komentar yang diberikan oleh warganet. Namun, berbeda dengan proses semiosis antar warganet yang terjadi lebih dari 1 tahap. Proses semiosis terjadi lebih dari 1 tahap karena munculnya representasi baru. Representasi baru merupakan tanggapan warganet yang kembali dikomunikasikan dan ditanggapi oleh warganet lain. Hal tersebut terus muncul sehingga adanya perluasan topik yang pada awalnya membicarakan mengenai pemindahan ibu kota negara menjadi perdebatan.

Berdasarkan hasil analisis bentuk relasi kekuasaan menurut Foucault (1982) terdapat tiga bentuk relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat diantara relasi strategi, *governmentality*, dan dominasi. Bentuk kekuasaan relasi strategi digunakan oleh pemerintah dengan memproduksi wacana mengenai pemindahan ibu kota negara. Pembahasan dan proses pemindahan ibu kota negara secara terus menerus diberitakan oleh pemerintah dengan memproduksi wacana. Hal tersebut memiliki tujuan untuk memaksa masyarakat agar menyetujui atau menerima keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara baru.

Pada isu pemindahan ibu kota negara, bentuk kekuasaan *Governmentality* digunakan agar masyarakat dapat mengambil tindakan yang akan mereka lakukan diantaranya mengikuti pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara atau menolak keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Namun, negara tetap mengarahkan masyarakat untuk mengikuti keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk membahas dan mengesahkan UU IKN dalam waktu yang singkat. Merujuk pengertian bentuk kekuasaan *Governmentality*, pemerintah mengatur, membentuk dan mengkonstruksi tindakan masyarakat agar menyetujui pemindahan ibu kota negara. Pemerintah menggunakan kekuasaannya agar pemindahan ibu kota negara tetap direalisasikan

Pada isu pemindahan ibu kota negara, masyarakat didominasi oleh pemerintah. Pemerintah mendominasi masyarakat dengan cara membuat aturan yaitu mengesahkan RUU IKN menjadi UU IKN, sehingga masyarakat tidak memiliki banyak pilihan tindakan selain mengikuti keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Pemerintah mengesahkan UU IKN meskipun melalaikan prinsip pembentukan UU IKN. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mendominasi masyarakat dengan cara membuat aturan baru. Pengesahan UU IKN dilakukan hanya sebagai pemberi legitimasi terhadap pemindahan ibu kota negara meskipun pengesahan UU IKN melanggar aturan pembentukan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengesahan UU IKN dilakukan agar pemerintah dapat merealisasikan pemindahan ibu kota negara secara cepat.

Kekuasaan sebagai pembuat kebenaran dengan cara membuat aturan dalam konteks pemindahan ibu kota negara terlihat dari langkah pemerintah untuk mengesahkan RUU IKN menjadi UU IKN meskipun melalaikan prinsip pembentukan UU yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yaitu pembentukan UU IKN tidak berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yaitu pembentukan dan pembahasan UU IKN dilakukan secara minim partisipasi dan tidak adanya asas keterbukaan publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peranan media massa yang dikemukakan oleh Devito (1998). Pemerintah menggunakan media siber untuk memproduksi wacana terkait pemindahan ibu kota negara. Langkah tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menginformasikan berita pemindahan ibu kota negara. Seiring berkembangnya teknologi kini media siber memiliki fungsi lain yaitu sebagai tempat terjadinya komunikasi yang dilakukan oleh warganet dalam menanggapi pemindahan ibu kota negara melalui kolom komentar yang disediakan oleh media siber. Warganet diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya baik dalam memberikan dukungan atau bantahan seperti mengkritisi kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya peranan lain media siber yaitu sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan dan merealisasikan kekuasaan melalui wacana interaktif. Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk memastikan penyebaran informasi berita mengenai pemindahan ibu kota negara dan mengukuhkan penyebaran kebijakan terkait pemindahan ibu kota negara melalui wacana di internet. Hal tersebut terjadi karena keberadaan media sarat dengan kepentingan politik (Tabroni, 2012).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengesahan UU IKN mengabaikan prinsip pemerintahan demokrasi yaitu “oleh rakyat”, dimana kebijakan seharusnya dibentuk atas dasar kepentingan rakyat atau nasional dan prinsip pemerintahan demokrasi “untuk rakyat”, dimana setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah harus bermuara pada kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi atau kelompok dan pemerintah mengabaikan nilai transparansi karena tidak menyerahkan naskah revisi UU IKN kepada DPR yang dimana DPR memiliki peran sebagai dewan perwakilan rakyat.

5.2. Implikasi

Penelitian ini berkontribusi terhadap keberagaman kajian dalam lingkup linguistik, khususnya kajian semiotik dan pragmatik. Kontribusi lain pada penelitian ini berkaitan dengan manfaat dan temuan penelitian. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat peran media siber dalam menginformasikan sebuah berita atau wacana interaktif terkait isu pemindahan ibu kota negara dan melalui analisis teks berita dapat terlihat bentuk kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat.

5.3.Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa catatan bagi peneliti untuk menjadi rekomendasi terkait penelitian teks berita yang menginformasikan mengenai IKN di media siber. Berikut ini pemaparan mengenai beberapa rekomendasi:

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk menggali lebih dalam teori-teori yang relevan, seperti prinsip kesantunan atau implikatur.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sejenis, disarankan untuk menggunakan objek penelitian yang lain, seperti pemberitaan yang berupa video, teks pidato atau meme mengenai tema yang sejenis.